
Potensi Ekonomi dan Strategi Peningkatan Pendapatan: Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2025 di Desa Kureksari

Carissa Pratiwi Salsadila¹ Rivani Anggraini Putri² Ayu Zuana Sari³ Aizzatul Azmil Arifin⁴ Mutia Syafitri⁵

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3,4,5}

Email: carissa.23001@mhs.unesa.ac.id¹ rivani.23029@mhs.unesa.ac.id² ayu.23040@mhs.unesa.ac.id³ aizzatul.23042@mhs.unesa.ac.id⁴ mutia.23044@mhs.unesa.ac.id⁵

Abstract. Kureksari Village utilizes local economic potential and designs strategies to increase revenue through analysis of the 2024 budget realization and the 2025 budget plan. Kureksari Village, located in Sidoarjo Regency, has a wealth of resources in the form of physical assets such as a sports building managed by BUMDes as well as non-physical potential such as a spirit of mutual cooperation and a high level of community education. This research was conducted using a qualitative descriptive approach through case studies, using data obtained from interviews, observations, and documentation. The findings show that village financial management has been directed towards the principles of transparency and efficiency, with a focus on spending on development, empowerment, and strengthening the community economy. Although village income in 2025 is projected to increase, challenges are still seen in efforts to increase Village Original Income (PADes) sustainably. The strategies implemented include increasing the professionalism of BUMDes management, mentoring small business actors, and expanding market access through digitalization. Therefore, it is recommended that villages continue to strengthen the capacity of their apparatus, increase community involvement, and build partnerships with external parties to support the achievement of economically independent villages.

Keywords: Kureksari Village, revenue strategy, economic potential, budget management, village empowerment

Abstrak. Desa Kureksari memanfaatkan potensi ekonomi lokal serta merancang strategi peningkatan pendapatan melalui analisis terhadap realisasi anggaran tahun 2024 dan rancangan anggaran tahun 2025. Desa Kureksari, yang berada di Kabupaten Sidoarjo, memiliki kekayaan sumber daya berupa aset fisik seperti gedung olahraga yang dikelola oleh BUMDes serta potensi non-fisik seperti semangat gotong royong dan tingkat pendidikan warga yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengarah pada prinsip transparansi dan efisiensi, dengan fokus pengeluaran pada pembangunan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Meskipun pendapatan desa pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat, tantangan masih terlihat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan profesionalitas pengelolaan BUMDes, pendampingan pelaku usaha kecil, dan perluasan akses pasar melalui digitalisasi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar desa terus memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta membangun kemitraan dengan pihak luar guna mendukung pencapaian desa yang mandiri secara ekonomi.

Kata kunci: Desa Kureksari, strategi pendapatan, potensi ekonomi, pengelolaan anggaran, pemberdayaan desa

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, yang pada hakekatnya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan

kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat (Halim dkk, 2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri, dan partisipatif.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya lokal serta penyelenggaraan program pembangunan. Beberapa tahun terakhir, peran desa semakin strategis seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan melalui transfer anggaran dan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa. Namun, kemandirian desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang diterima, melainkan pada bagaimana desa mampu merancang dan menjalankan strategi ekonomi secara berkelanjutan, inovatif, dan berbasis pada kekuatan lokal. Desa Kureksari, yang terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik UMKM, maupun pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara efektif dan menyusun strategi peningkatan pendapatan yang tepat sasaran.

Desa Kureksari merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi yang beragam dan dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian desa. Potensi ini tersebar di berbagai sektor yang apabila dikelola secara terintegrasi dan inovatif, mampu menjadi sumber pendapatan desa yang signifikan. Diantaranya ada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti camilan hingga pengrajin besi. Kemudian BUMDes Kureksari memiliki peran sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan penyewaan gedung badminton.

Salah satu upaya baru yang sedang dijajaki oleh Pemerintah Desa adalah keterlibatan dalam program Koperasi Merah Putih, yang secara nasional dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan akses warga terhadap pembiayaan usaha mikro. Namun demikian, menurut keterangan Sekretaris Desa Kureksari, implementasi program ini masih terkendala oleh ketidakjelasan regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya, meskipun potensi koperasi ini besar untuk mendukung pendapatan desa, pelaksanaannya masih tertunda dan belum dapat dijadikan sumber pendapatan secara pasti pada tahun anggaran berjalan.

Pengelolaan anggaran desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Anggaran / Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama (Sutiyono et al., 2018). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), program dana desa mendorong

pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana desa juga mendorong tercapainya pembangunan yang merata antar desa, pelayanan publik di desa yang semakin baik, majunya perekonomian desa, masyarakat desa yang berdaya guna, serta berkurangnya kemiskinan.

Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Desa Kureksari telah menjalankan program-program prioritas yang dirancang berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes), dengan fokus utama pada penyelenggaraan pemerintahan desa seperti operasional kantor, penguatan kelembagaan, dan administrasi keuangan. Dari sisi pendapatan, desa memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/provinsi, serta pendapatan asli desa (PADes).

Pemerintah Desa Kureksari menetapkan sejumlah strategi peningkatan pendapatan desa yang berfokus pada optimalisasi sumber daya. Strategi ekonomi desa merupakan pondasi penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, desa tidak cukup hanya menjadi penerima program dan dana dari pemerintah pusat, melainkan dituntut untuk mampu merancang langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penguatan potensi internal, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi kelembagaan ekonomi.

Langkah-langkah strategis ini juga mencakup penyesuaian terhadap perubahan regulasi, dinamika pasar, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui strategi yang terarah dan berbasis kebutuhan riil warga, Desa Kureksari menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta menciptakan sistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Melalui artikel ini, kami akan mengulas secara ringkas bagaimana strategi ekonomi Desa Kureksari mulai dibangun, bagaimana realisasi anggaran tahun 2024 menjadi cerminan tantangan dan peluang yang ada, serta bagaimana proyeksi anggaran tahun 2025 disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan. Diharapkan, pengalaman Desa Kureksari ini dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam mengembangkan pendekatan ekonomi berbasis potensi dan partisipasi masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Keuangan Publik

Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas. Menurut Harvey S. Rossen dan Ted Gayer dalam bukunya, *Public Finance* disebut juga dengan istilah *Ekonomi Publik*, yang mengatakan bahwa keuangan publik membahas mengenai analisis berbagai pajak pemerintah dan kebijakan pembelanjanya (Jaelani, 2018).

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Good Governance

Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja 12 dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Menurut Tjokroamidjojo (1990) terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

Strategi

Menurut Siagian (2004) memberikan definisi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh

seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Siagian lebih cenderung mengemukakan pendapatnya tentang bisnis.

Stephanie K. Marrus menjelaskan bahwa strategi ialah merupakan suatu proses yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Craig & Grant (1996) yang mengartikan, pengertian strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Menurut Chandler dalam buku Analisis Swot (2003:3) menjelaskan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Potensi

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi satu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. (Wiyono, 2008).

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu artinya kemampuan, potensi adalah kemampuan menerima yang lain dari ciri semula. Potensi adalah kekuasaan, kekuatan, dan tenaga (Panmungskas, 1995).

Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang terdapat di daerah mampu untuk dikembangkan dan terus untuk dikembangkan agar menjadi sumber pendapatan daerah tersebut serta menjadi sumber penghidupan perekonomian masyarakat setempat. Dengan pengembangan potensi yang ada bahkan dapat mendorong pembangunan perekonomian daerah (Suparmoko,2002).

3. METODE

Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif, yang memfokuskan pada analisis potensi desa, pengelolaan BUMDes, strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi desa. Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Peneliti hadir di lokasi desa untuk melakukan pengumpulan data secara langsung.

Subjek penelitian adalah pemerintah desa, pengurus bumdes, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria mereka yang memahami dan terlibat langsung dalam perencanaan,

pengelolaan, dan pemanfaatan potensi ekonomi desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan Wawancara mendalam kepada Kepala Desa, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat. Observasi partisipatif terhadap kegiatan ekonomi desa (pengelolaan gedung bulutangkis, bazar UMKM, layanan desa).

Studi dokumentasi berupa data APBDes, RKP Desa, dan laporan BUMDes. Penelitian dilakukan di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pengumpulan data dilaksanakan selama satu hari pada Senin, 5 Mei 2025. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber (perbandingan keterangan dari beberapa informan) dan triangulasi teknik perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Kureksari

Desa Kureksari terletak di Kecamatan Waru Sidoarjo. Secara geografis, Desa Kureksari merupakan desa yang memiliki luas wilayah keseluruhan 106.316 HA (M2). Desa Kureksari ini berbatasan dengan beberapa desa, diantaranya yaitu :

- a. Sebelah utara : Desa Kedungrejo
- b. Sebelah timur : Desa Waru
- c. Sebelah Selatan : Desa Sawotratap
- d. Sebelah barat : Desa Ngingas

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran Desa Kureksari pada tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Berikut laporan anggaran pendapatan dan pengeluaran Desa Kureksari Tahun 2024:

Tabel 1. laporan Anggaran

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Desa	Rp. 2.975.563.188,00	Rp. 2.979.662.545,48
Pendapatan asli desa	Rp. 55.000.000,00	Rp. 55.000.000,00
Dana desa	Rp. 1.422.427.000,00	Rp. 1.422.427.000,00
Bagi hasil/Retribusi	Rp. 706.331.123,00	Rp. 706.331.123,00
Alokasi dana desa	Rp. 470.805.265,00	Rp. 470.805.265,00
Bantuan keuangan provinsi	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
Lain lain pendapatan	Rp. 71.000.000,00	Rp. 75.099.157,48
Belanja		
Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 1.198.433.620,00	Rp. 1.171.184.004,00
Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 1.198.993.240,00	Rp. 1.158.545.177,00
Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 111.859.995,00	Rp. 109.552.481,00
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 368.721.000,00	Rp. 357.246.800,00
Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	Rp. 159.000.000,00	Rp. 156.265.000,00
Pembiayaan		
Penerimaan pembiayaan	Rp. 61.444.467,83	Rp. 61.444.467,83
Silpa tahun berjalan	Rp. 0,00	Rp. 88.313.551,31

Belanja desa difokuskan pada lima bidang utama, dengan realisasi yang umumnya sedikit dibawah pagu anggaran, menunjukkan efisiensi penggunaan dana. Pendapatan utama desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil/retribusi, bantuan keuangan provinsi, dan pendapatan asli desa (PADes). Belanja terbesar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Efisiensi anggaran tercermin dari realisasi belanja yang umumnya di bawah anggaran, serta adanya SiLPA.

Realisasi anggaran tahun 2024 di Desa Kureksari menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan efisien, dengan fokus pada pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa. Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan aset dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun masih menghadapi tantangan pada beberapa program baru

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 2. laporan Anggaran

Uraian	Anggaran
Pendapatan Desa	Rp. 3.127.658.752,00
Pendapatan asli desa	Rp. 35.000.000,00
Dana desa	Rp. 1.655.787.000,00
Bagi hasil pajak/retribusi	Rp. 860.174.708,00
Alokasi dana desa	Rp. 502.275.044,00
Lain lain pendapatan	Rp. 74.422.000,00
Belanja	
Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 1.362.177.520,00
Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 1.121.531.900,00
Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 177.080.000,00
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 359.924.900,00
Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	Rp. 180.600.000,00
Pembiayaan	
Penerimaan pembiayaan	Rp. 88.155.728,71
Pengeluaran pembiayaan	Rp. 14.500.000,00

Berdasarkan data yang ditampilkan, total pendapatan desa pada tahun 2025 mencapai Rp 3.127.658.752,00, yang berasal dari berbagai sumber pendanaan utama. Komponen terbesar pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebesar Rp 1.655.787.000,00, diikuti oleh Bagi Hasil Pajak atau Retribusi sebesar Rp 860.174.708,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 502.275.044,00, Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 35.000.000,00, serta Lain-lain Pendapatan yang memberikan kontribusi sebesar Rp 74.422.000,00.

Dari sisi belanja, alokasi anggaran disalurkan ke berbagai bidang strategis yang mendukung kelangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintah Desa menerima alokasi tertinggi yaitu sebesar Rp 1.362.177.520,00, menandakan pentingnya penguatan kelembagaan dan pelayanan administratif di tingkat desa. Pelaksanaan

Pembangunan Desa yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 1.121.531.900,00 menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar masyarakat, seperti jalan desa, drainase, fasilitas publik, dan sebagainya.

Selain itu, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat masing-masing memperoleh anggaran sebesar Rp 177.080.000,00 dan Rp 359.924.900,00, yang menunjukkan perhatian desa terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan sosial, keagamaan, serta pemberdayaan kelompok-kelompok produktif. Tak kalah penting, desa juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180.600.000,00 untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap berbagai kondisi yang tidak terduga.

Dalam aspek pembiayaan, Desa Kureksari menerima pembiayaan sebesar Rp 88.155.728,71, sementara pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp 14.500.000,00. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengelolaan keuangan yang tetap memperhitungkan keseimbangan fiskal, sekaligus memanfaatkan potensi pembiayaan untuk menopang kegiatan strategis desa. Secara keseluruhan, struktur realisasi anggaran Desa Kureksari tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana desa merencanakan dan mengeksekusi program-program pembangunan dan pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Keseimbangan antara belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mencerminkan arah kebijakan pembangunan desa yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil. Dengan dukungan anggaran yang cukup dan pengelolaan yang baik, Desa Kureksari diharapkan mampu memperkuat kapasitas lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkelanjutan.

Potensi Ekonomi Desa Kureksari

Potensi desa merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu desa, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi ini menjadi aset penting yang jika dikelola secara optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup warga. Setiap desa memiliki karakteristik potensi yang berbeda, tergantung pada kondisi geografis, sosial, dan budaya yang dimilikinya. Dalam hal ini, Desa Kureksari memiliki berbagai potensi yang beragam dan layak untuk terus dikembangkan.

Potensi yang dimiliki Desa Kureksari terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik merupakan segala sesuatu yang tampak dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan masyarakat. Salah satu potensi fisik unggulan

Desa Kureksari adalah gedung bulutangkis yang disewakan kepada masyarakat umum. Gedung ini masih beroperasi hingga sekarang dan menjadi salah satu aset desa yang bernilai ekonomis. Pengelolaan gedung dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang juga bertanggung jawab atas pengembangan, kebersihan, dan perawatan sarana dan prasarana gedung.

Selain gedung olahraga, potensi fisik lainnya yang dimiliki Desa Kureksari adalah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di wilayah desa. Beberapa sekolah yang berdiri di desa ini antara lain TK Dharmawanita Kureksari, SDN Kureksari, SMP Wachid Hasyim 8 Waru, dan MA Darul Ulum. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut tidak hanya memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak desa, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Potensi ini menjadi salah satu kekuatan desa dalam membangun generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Sementara itu, potensi non fisik Desa Kureksari tidak kalah penting dalam mendukung kemajuan desa. Salah satu potensi non fisik yang menonjol adalah budaya gotong royong yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat. Budaya ini mencerminkan solidaritas dan semangat kebersamaan yang tinggi antarwarga, yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan. Gotong royong menjadi perekat sosial yang memperkuat struktur sosial desa dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Potensi non fisik lainnya terletak pada kualitas pendidikan warga desa. Rata-rata penduduk Desa Kureksari memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Banyak warga yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1), bahkan terdapat pula lulusan magister (S2) dan doktor (S3). Tingkat pendidikan yang tinggi ini mencerminkan bahwa desa memiliki sumber daya manusia yang unggul dan siap berperan aktif dalam memajukan desa. Dengan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang ada secara sinergis, Desa Kureksari memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Strategi Peningkatan Pendapatan Desa Kureksari

Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes memiliki peran sentral sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional. Di Desa Kureksari, salah satu aset yang dikelola oleh BUMDes adalah gedung bulutangkis yang menjadi potensi unggulan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam manajemen BUMDes.

Salah satu langkah penting dalam peningkatan kapasitas tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan bagi para pengelola BUMDes. Pelatihan ini bertujuan agar para pengelola memiliki pemahaman yang lebih baik terkait cara menjalankan usaha desa secara efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan manajemen yang profesional, diharapkan BUMDes mampu mengembangkan unit-unit usahanya lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan desa dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Selain peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi BUMDes juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan dan fasilitas gedung bulutangkis. Gedung ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti turnamen dan event olahraga yang berskala lokal maupun regional. Dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, seperti penerangan, kebersihan, dan kelengkapan perlengkapan olahraga, maka daya tarik gedung akan meningkat dan mampu mendatangkan lebih banyak pengunjung, bahkan dari luar desa. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap roda ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta produk lokal juga menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. UMKM memiliki peranan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga desa. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM, khususnya pengrajin serta produsen makanan ringan seperti keripik kentang, ketela ramban, dan jamu sinom, perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Pendampingan ini dapat mencakup teknik produksi yang lebih higienis, pengemasan yang menarik, hingga strategi pemasaran.

Agar produk UMKM lebih dikenal luas dan memiliki nilai jual yang tinggi, perlu adanya fasilitasi akses pemasaran yang efektif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kegiatan bazar dan pameran, baik di tingkat lokal maupun regional. Selain itu, menjalin kerja sama dengan platform digital atau e-commerce juga menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, produk lokal Desa Kureksari dapat bersaing di pasar yang lebih luas dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa.

Peran APBDES di Desa Kureksari

Di Desa Kureksari, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) memegang peranan sentral sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. APBDes menjadi landasan strategis bagi pemerintah desa dalam menyusun program kerja yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebagaimana ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Pertama, APBDes berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan desa yang terstruktur dan transparan. Melalui APBDes, Pemerintah Desa Kureksari mampu mengalokasikan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa (PADes), bagi hasil retribusi, serta bantuan keuangan dari provinsi ke dalam lima bidang belanja utama: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana/desa darurat. Hal ini menunjukkan bahwa APBDes menjadi dasar dalam mengatur arah belanja yang berpihak pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal.

Kedua, APBDes menjadi sarana untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Dalam tahun anggaran 2024, realisasi belanja Desa Kureksari cenderung di bawah pagu anggaran, mencerminkan penggunaan dana yang efisien dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menargetkan serapan anggaran, tetapi juga mengedepankan efektivitas pemanfaatan dana.

Ketiga, APBDes berperan dalam memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pengelolaan gedung bulutangkis oleh BUMDes dan pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan dukungan APBDes, kegiatan ekonomi produktif di desa dapat dikembangkan melalui penyediaan pelatihan, pendampingan, serta perbaikan fasilitas usaha. Ini sejalan dengan upaya strategis desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara mandiri.

Terakhir, APBDes di Desa Kureksari tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola desa yang berbasis pada prinsip *good governance*. Partisipasi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran mencerminkan adanya sistem pemerintahan desa yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Pengaruh APBDES terhadap kesejahteraan masyarakat desa Kureksari

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kureksari. Sebagai instrumen keuangan yang mengatur seluruh pendapatan dan belanja desa, APBDes menjadi fondasi utama dalam mendanai berbagai program pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang berdampak

langsung pada kehidupan warga. Dalam konteks Desa Kureksari, alokasi anggaran yang proporsional pada bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan sosial telah membuka akses yang lebih luas terhadap fasilitas publik, seperti penyediaan gedung olahraga, penguatan UMKM lokal, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pengaruh APBDes terlihat dari meningkatnya kapasitas ekonomi warga melalui berbagai program yang didanai anggaran desa, seperti pelatihan manajemen BUMDes dan dukungan terhadap kegiatan UMKM. Dengan adanya dukungan dana yang cukup dan pengelolaan yang efisien, warga desa dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan lapangan kerja lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran desa menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan desa.

Penggunaan APBDes yang berbasis kebutuhan riil warga dan dikelola secara transparan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini menciptakan stabilitas sosial, memperkuat kohesi antar warga, serta mempercepat perwujudan desa mandiri dan sejahtera. Dengan demikian, APBDes di Desa Kureksari tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif keuangan, melainkan juga sebagai motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikaji dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Kureksari memiliki kapasitas ekonomi lokal yang sangat menjanjikan dan berpotensi besar untuk mendukung kemandirian fiskal desa secara berkelanjutan. Potensi ekonomi yang dimiliki desa ini mencakup sumber daya fisik seperti gedung olahraga dan lembaga pendidikan, serta potensi non-fisik berupa budaya gotong royong, tingginya kualitas pendidikan masyarakat, dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Potensi tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung program-program pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Pengelolaan potensi ini membutuhkan strategi yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga berpijak pada partisipasi masyarakat, inovasi lokal, dan pemanfaatan teknologi.

Realisasi anggaran tahun 2024 menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Desa Kureksari telah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Pemerintah desa mampu menyalurkan dana anggaran ke dalam lima bidang utama secara proporsional, yaitu

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan keadaan darurat. Tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran juga tercermin dari realisasi belanja yang cenderung berada di bawah pagu anggaran, serta adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang hemat namun tetap produktif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) menjadi elemen penting dalam penyusunan prioritas anggaran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam APBDes sebagai dokumen perencanaan keuangan yang menyeluruh dan aspiratif.

Proyeksi anggaran tahun 2025 menunjukkan peningkatan total pendapatan desa, dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil retribusi sebagai sumber utama pendapatan. Namun, peningkatan PADes masih menjadi tantangan tersendiri, yang memerlukan strategi khusus dari pemerintah desa agar tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi. Dalam hal ini, strategi peningkatan pendapatan yang dirancang Desa Kureksari menunjukkan pendekatan yang terencana dan progresif, seperti penguatan BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal, pelatihan manajemen usaha, perbaikan fasilitas usaha, serta promosi UMKM melalui bazar, pameran, dan media digital. Dengan adanya pendampingan terhadap pelaku usaha lokal dan kerja sama lintas sektor, desa ini memiliki peluang besar untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi warganya.

Lebih jauh, peran APBDes di Desa Kureksari tidak hanya sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui APBDes, pemerintah desa tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membuka ruang partisipatif bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam pembangunan. Pengaruh APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat tercermin dari meningkatnya akses terhadap fasilitas publik, terbukanya peluang usaha, meningkatnya kapasitas individu melalui pelatihan, dan terciptanya lingkungan sosial yang inklusif serta stabil. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Desa Kureksari sangat bergantung pada sinergi antara pengelolaan keuangan desa yang baik, pengembangan potensi ekonomi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Desa Kureksari dapat menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang mandiri, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan potensi lokal dan strategi ekonomi yang visioner.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam artikel ini, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi dan tata kelola anggaran di Desa Kureksari. Pertama, pemerintah desa perlu fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa dan pengelola BUMDes, melalui pelatihan manajerial, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital agar pelaksanaan program ekonomi desa dapat berjalan secara profesional dan akuntabel. Kedua, desa perlu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui diversifikasi unit usaha BUMDes dan pengembangan potensi lokal lainnya, seperti UMKM, layanan jasa, serta pemanfaatan aset desa secara produktif agar desa tidak terlalu bergantung pada transfer dana pusat. Ketiga, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan layanan dan pemasaran produk desa menjadi hal yang penting untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya, untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat serta peran lembaga desa, seperti BPD, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program anggaran. Selain itu, Desa Kureksari juga disarankan untuk membangun jejaring kerja sama dengan pihak eksternal, seperti dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun lembaga pembiayaan mikro, guna memperkuat inovasi, memperluas akses permodalan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

Terakhir, desa perlu secara konsisten melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan ke depan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Desa Kureksari mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan menjadi contoh praktik tata kelola pembangunan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 1–23.

Angraini, M. S., & Asim, M. (2024). *Strategi BUMDES dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Madura* *Strategy of Village-Owned Enterprises in Efforts to Develop Tourism Villages Based on Village Potential to Increase Original Village Income in Madura*. 7(November), 302–312.

- Aryani, M. D. S. (2021). *Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul*. 2013, 1–23.
- Intanghina. (2019). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 9.
- Mahendra. (2020). *Strategi Pengembangan pada Desa Wisata di Kelurahan Desa Pentingsari Yogyakarta*. 2004, 6–26.
- Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2021). Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3177>
- Septyansyah Perdana. (2024). Pengelolaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2582–2588. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2779>
- Tafriji Biswan, A. (2022). *Keuangan Publik: Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik*.
- Tamrin, M. H., & Rifti, L. (2023). Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Bumdes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 167–177. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3598>